

Judul : Performa BUMN membaik, kinerja Menteri Erick nyaris sempurna
Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Performa BUMN Membaik

Kinerja Menteri Erick Nyaris Sempurna



Darmadi Durlianto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durlianto mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengawal kinerja perusahaan pelat merah sepanjang Tahun 2021. Atas jerih payahnya, Menteri Erick dapat rapor nyaris sempurna alias sangat memuaskan.

"Saya lihat kinerja Pak Erick luar biasa, nilai 9 dari saya. Karena memang kelihatan benar performa BUMN itu walau ekonomi kita diterpa pandemi Covid-19," kata Darmadi di Jakarta, kemarin.

Darmadi menilai, Menteri Erick banyak melakukan terobosan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan milik negara lebih efisien dan produktif. Mulai dari pembentukan holding, likuidasi anak dan cucu perusahaan pelat merah, restrukturisasi, hingga mendorong perusahaan negara hermitra dan berkontri-

busi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Darmadi juga memuji langkah Menteri Erick meningkatkan performa perusahaan-perusahaan pelat merah dengan menambahkan nilai inti atau core values dalam BUMN menjadi ber-AKHLAK. Adapun "AKHLAK" merupakan akronim yang berorientasi pada nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Values ber-AKHLAK itu, lanjutnya, sangat bagus dan memang harus dianut oleh perusahaan BUMN. "Cuma memang masih ada perusahaan BUMN di bawah ini belum melaksanakan dengan baik. Dari sisi kementerian sudah bagus, tinggal bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan BUMN itu mempunyai share value ber-AKHLAK tadi," sarannya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kiprah Menteri Erick bersama jajaran mengangkat performa BUMN sejauh ini terbilang sangat kreatif dan adaptif terhadap perkembangan situasi saat ini. Walau masih ada beberapa perusahaan yang sakit, masih bisa dimaklumi karena memang terdapat faktor-faktor undang-undang sehingga tidak memungkinkan dilakukan likuidasi dengan cepat.

Berbagai rintangan dari BUMN yang bisa jadi tidak lincah karena masalahnya di undang-undang itu harus segera diselesaikan. Salah satunya revisi Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Banyak aturan-aturan yang masih membatasi terutama Undang-Undang Keuangan Negara yang sangat membuat BUMN terkurung, sehingga tidak bisa lincah. Ini membuat mereka banyak yang sakit sementara bebannya semakin bertambah, bukan semakin ringan," jelasnya.

Problem lainnya, masih banyak sumber daya manusia (SDM) di perusahaan BUMN yang tidak kompeten terutama di jabatan direksi. Mereka tidak mampu melihat masa depan dan menyesuaikan dengan cepat, hingga akhirnya malah cenderung membuat perusahaan tersebut kolaps. Bisa dipahami kalau kemudian Menteri Erick kemudian mengambil tindakan tegas dengan mencopot beberapa direksi di BUMN.

"Jadi tidak mampu membaca situasi dan bahkan ada yang tidak mengantisipasi laporan keuangan misalnya. Kemudian *Early Warning System* (EWS)-nya tidak jalan. Makanya kita minta direksi ini segera diganti," jelasnya.

Terakhir, Darmadi juga mendukung langkah Kementerian BUMN menginisiasi penjualan atau pelepasan perusahaan pelat merah dengan pendapatan di bawah Rp 50 miliar. Karena, tak sedikit anak perusahaan BUMN yang masih ingin terlibat pada sektor untuk UMKM.

"Memang harus didorong BUMN yang inklusif, yang mampu membangkitkan UMKM dan Koperasi. Jadi jangan membangkitkan perusahaan besar. Jangan fokusnya ke sana," katanya. ■ KAL